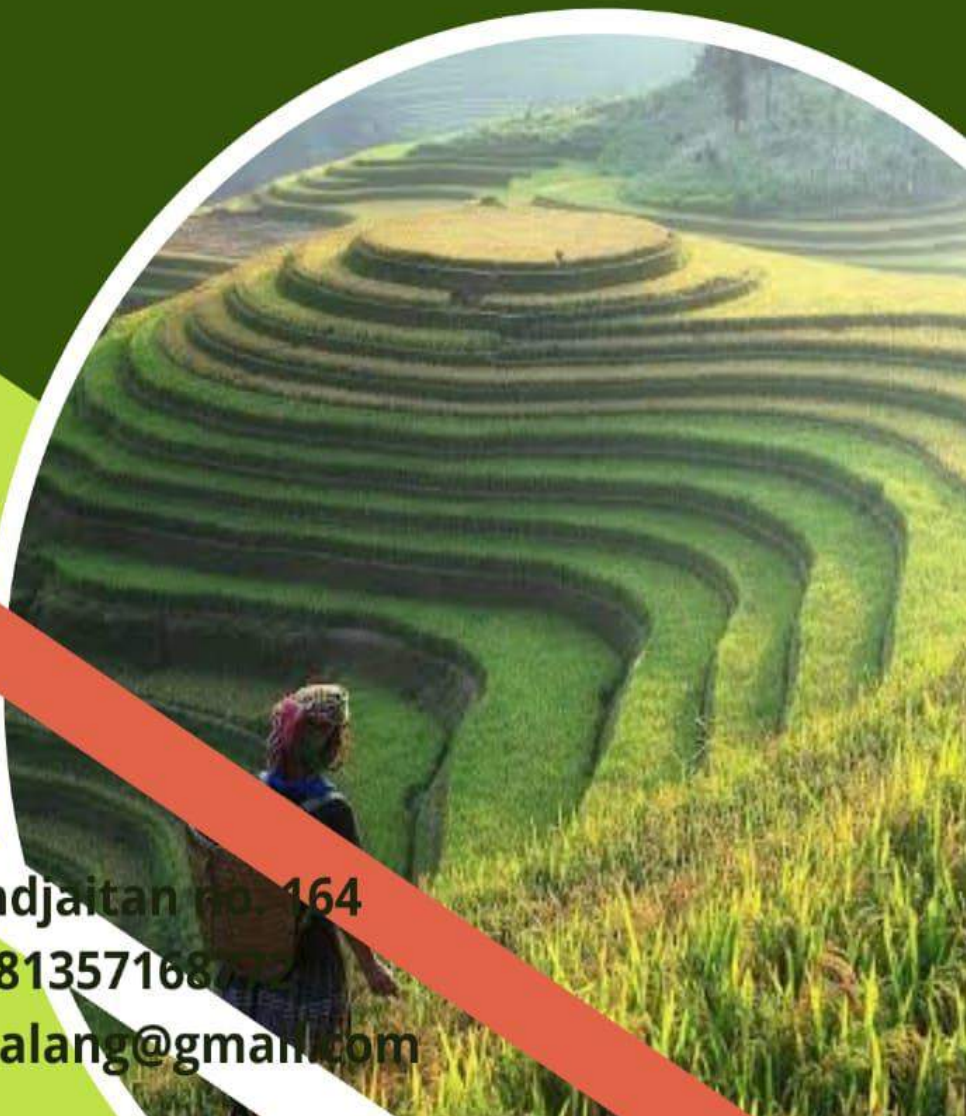




# TOR SKK KE-VII

## KOPRI PC.PMII KOTA MALANG

*'Aktualisasi Gerakan perempuan dalam Impresi kebijakan reformasi agraria'*



**Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164**

**Malang 65113 telp. 08135716877**

**Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)**

## **TERM OF REFERENCE**

### **SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) KE-VII**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pengarusutamaan perspektif gender pada konteks perjuangan reforma agraria tidaklah sesederhana memenuhi keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam program-program pemberdayaan, proyeksi pembangunan, dan bahkan gerakan sosial. Menelusuri keadilan agraria bagi perempuan adalah menyangkut penelusuran ihwal dinamika sejarah patriarki yang mengendap dalam kurun waktu sangat panjang- dalam wilayah rural yang seolah-olah membatu dan bahkan tak jarang diinternalisasi sebagai norma adiluhung dalam masyarakat. Dalam tatanan masyarakat yang dilandasi pada sistem hubungan yang patriarkis tersebut, walaupun realitanya perempuan aktif dalam proses produksi, namun segala kegiatan perempuan dan persepsi masyarakat terhadap status dan posisi perempuan dilingkupi oleh nilai-nilai yang patriarkis, yang memihak pada pria. Nilai-nilai patriarkis ini, selain telah menciptakan domain ruang hidup pembeda antara perempuan dan laki-laki sebagaimana perbedaan antara domestik dan publik, juga menjadi sumber bagi ketidakadilan lain yang menyangkut hak-hak perempuan dalam proses produksi maupun reproduksi.

Ketidakadilan dan marginalisasi perempuan yang kemudian menunjukkan mode representasi perempuan sebagai “warga kelas dua” ini dapat mula-mula kita telusuri secara mendasar melalui ideologi yang memisahkan antara *nature* dan *culture*. Perempuan yang dikatakan mewakili sifat “alam” (*nature*) harus ditundukan agar mereka lebih berbudaya (*culture*). Usaha pembudayaan perempuan ini telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan (MacCormack, 1994). Dikotomi-dikotomi semacam inilah yang telah turut membentuk realitas sosial sekaligus menjadi pengarusutamaan dalam wacana gender.

Meskipun wacana mengenai gender sebenarnya baru mulai berkembang pada abad ke-20, bukan berarti gerakan yang memperjuangkan hak perempuan tidaklah muncul pada periode-periode sebelumnya. Gerakan semacam ini telah mulai banyak muncul ke publik pasca abad pertengahan. Isu mengenai kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki ini, muncul diakibatkan subordinasi gereja dan kekuatan-kekuatan aristokrat eropa yang ketika itu banyak menyingkirkan perempuan. Revolusi yang terjadi di Eropa selanjutnya, telah turut membuat gerakan perempuan mendapatkan kesempatan untuk ikut menyuarakan kepentingan mereka. Pada Revolusi Puritan di Inggris Raya pada abad 17, kaum perempuan puritan berusaha untuk mendefinisikan ulang area aktivitas perempuan dengan menarik legitimasi dari doktrin-doktrin yang menjadi otoritas bapak, laki-laki, pendeta dan pemimpin politik. Revolusi Puritan telah menghasilkan ferment dimana semua bentuk hierarki ditulis oleh semua anggota sekte yang radikal di Inggris Raya. Pada tahun 1890, kata feminis mulai digunakan untuk mendeskripsikan

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII**  
**KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI**  
**KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



kampanye perempuan pada pemilihan umum ketika banyak organisasi telah didirikan di Inggris untuk menyebarkan ide liberal tentang hak individual perempuan.

Di Indonesia sendiri, tonggak sejarah dari munculnya gerakan perempuan adalah melalui Kongres Perempuan I pada 22-25 Desember 1928 yang menghasilkan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Dalam kongres pertama inilah PPPI mulai membicarakan mengenai hak perempuan meliputi pendidikan perempuan, nasib yatim piatu dan janda, perkawinan, reformasi undang-undang perkawinan, pentingnya menaikkan martabat perempuan dan kejahatan kawin paksa (Darwin, 2004). Hingga dalam beberapa kongres lanjutan, PPPI ini mulai merambah untuk memperjuangkan beberapa hal berkaitan dengan kesetaraan dalam pekerjaan hingga pada aspek politik perempuan (Gunawan, 1993).

Gerakan mengenai isu-isu perempuan ini semakin massif dalam masa pemerintahan Soekarno. Munculnya organisasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) telah turut memelopori tuntutan akan hak-hak perempuan, utamanya terkait kepemilikan tanah dan pengupahan bersama-sama organisasi petani dan pekerja untuk mengambil alih perkebunan kolonial, sebuah gerakan yang dikenal sebagai nasionalisasi perkebunan (Wieringa, 1999). Perubahan orientasi gerakan perempuan berbanding terbalik pada era Orde Baru. Presiden Soeharto melakukan kontrol politik yang ketat terhadap organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan. Gerakan perempuan direpresi secara sistematis dengan menstigmatisasi organisasi perempuan progresif seperti Gerakan Wanita Indonesia/Gerwani (Wieringa, 1999). Rezim Soeharto membangun wacana untuk mendepolitisasi perempuan dan memandang mereka sebagai aktor sosial yang patuh dan patuh. Selama satu setengah dekade pertama pemerintahan Soeharto, satu-satunya organisasi perempuan yang mampu beroperasi adalah yang disponsori oleh pemerintah seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK (Pendidikan Keluarga Kesejahteraan) (Subono, 1999).

Meskipun dalam beberapa aktifitasnya organisasi-organisasi keperempuanan mendapatkan represifitas dari Orde Baru, bukan berarti tidak ada pengawalan sama sekali untuk isu-isu perempuan. Deklarasi 1976-1985 oleh PBB sebagai Dekade PBB untuk perempuan menandai tumbuhnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan ketidakadilan gender di Indonesia dan memberi ruang bagi munculnya LSM perempuan di Indonesia. LSM-LSM perempuan mulai muncul untuk mengkampanyekan wacana gender sebagai konsep, disiplin keilmuan dan metodologi sehingga dikenal publik (Aripurnami, 2013). Konsep gender sendiri baru kemudian banyak dikenal publik pada tahun 1970 melalui gerakan feminis sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat pada akhirnya berbeda-beda. Kemudian wacana gender diperkenalkan oleh sekelompok feminis di London pada awal tahun 1977 (Butler, 1990). Sejak itu para feminis mengusung konsep *gender equality* atau kesetaraan jender sebagai

mainstream gerakan mereka. Dimana dalam konsep ini, gender menitikberatkan pada stereotype budaya antara laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut (Chodorow, 1994). Mengenai hal ini juga, gender juga dapat dimaknai sebagai konstruksi dan alat analisis. Sebagai konstruksi, gender menstrukturkan wacana kehidupan sosial (cara kita memandang realitas, memahami sejarah, serta bertutur). Sebagai alat analisis, gender membantu kita membongkar asal-usul superioritas pengalaman laki-laki atas perempuan, dan menggali kembali pengalaman perempuan dan mengenali gerakan sosial perempuan (Siscawati dan Mahaningtyas, 2012).

### **Ketidakadilan Gender dalam Ketimpangan Struktur Agraria**

Dalam dimensi krisis dan ketimpangan struktur agraria yang semakin tinggi, dimana struktur penguasaan sumber-sumber agraria semakin dimonopoli oleh pasar-modal, seringkali diskursus mengenai gender tidak menjadi bahan pertimbangan penting, potret termasuk dalam kasus penyempitan, perampasan dan pemusnahan ruang-ruang hidup. Potret ketimpangan ini seringkali ditandai oleh fenomena *Deruralisasi* akibat alat produksi berupa tanah yang secara terus menerus dirampas oleh rezim yang semakin memfasilitasi pemodal, akibatnya banyak petani dan buruh tani yang berbondong-bondong masuk pada ruang perkotaan sebagai buruh migran. *Padahal*, jika kita menilik pada sejarah kapitalisme dan kemunculan negara-negara modern melalui lensa feminisme, misalnya, kita akan dapat melihat bahwasannya perombakan sumber agraria saat krisis feodalisme justru secara langsung mensyaratkan adanya subordinasi atas perempuan, melalui pembagian kerja secara seksual dan peng-iburumahtangaan (housewifization); feminisasi dan devaluasi kerja-kerja reproduksi; dan perburuan penyihir perempuan (Federici, 2004). Olehnya, secara tidak langsung kemunculan, perkembangan dan dominasi kapitalisme yang didalamnya bergulir syarat akumulasi dan perampasan, secara langsung juga mensyaratkan akumulasi patriarkis, memperparah penindasan dan mempersempit ruang hidup.

Meskipun dalam data statistik, perempuan mendominasi dalam jumlah besar sebagai petani/buruh tani (Federici, 2012), hak kepemilikan atas tanah dalam jumlah terbesar adalah dimiliki oleh laki-laki. Dalam data FAO menunjukkan bahwa hanya kurang dari 13 persen lahan pertanian di dunia yang dimiliki oleh perempuan (FAO, 2018). Data ini, tampaknya tidak jauh berbeda dengan data menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana hanya 24,2 persen tanah Indonesia yang terdaftar di bawah kepemilikan perempuan (BPN, 2017). Rendahnya tingkat kepemilikan perempuan ini disebabkan oleh bias gender, dimana sebagaimana terjadi dalam hampir semua sejarah masyarakat dunia, perempuan secara historis mengelola ekonomi perawatan yang tidak dibayar (*care*) dan memenuhi tanggung jawab memasak, membersihkan, merawat keluarga, mengumpulkan bahan bakar, pakan ternak, air, berkebun, mengurus dapur,

peternakan dan menyediakan keamanan pangan dan gizi. Disinilah bahwa seringkali kontribusi perempuan terhadap ekonomi dan masyarakat pada umumnya tetap tidak diakui, sebagian besar dibayar rendah dan sebagian besar tidak dibayar, kebutuhan perempuan untuk dapat mendapat keadilan atas sumber agraria, mengamankan hak dan properti menjadi semakin penting.

Dalam sejarah Indonesia sendiri, politik gender memainkan peranan penting pada konteks perjuangan sumber-sumber agraria. Ekses patriarki telah terbukti menjadi kekuatan sosial sekaligus mekanisme control yang bekerja memproduksi dan mereproduksi kemiskinan perempuan, utamanya dalam wilayah urban ini (Austingrum, 2019). Pada era kolonialisme, dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, pemerintah kolonial lebih banyak memberikan hak pengelolaan pada petinggi-petinggi desa, atau pada feodal-feodal kecil setempat (read; Husken, 1998). Selain itu, dalam wilayah kehutanan, pengiriman rimbawan profesional laki-laki untuk mengelola hutan *saintifik*, memberikan hak dan akses hanya pada laki-laki pribumi dari kalangan elit serta menjadikan laki-laki kelas miskin sebagai buruh untuk mengelola wilayah yang akan menjadi hutan industri memperlihatkan pola patriarkis yang kuat (Peluso, 1992). Anggota keluarga perempuan, tidak lebih hanya mendapatkan kerja sebagai pembantu yang seringkali tanpa upah (Peluso, 1992).

Selama masa kemerdekaan, *land reform* pada konteks perebutan sumber agraria tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hadirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sejatinya bertujuan untuk melaksanakan reforma agraria, dengan misi pembagian aset yang diinisiasi oleh Soekarno masih jauh dari selesai dan bahkan masih diperdebatkan dalam praksis, yang akhirnya berakhir pasca peristiwa 1965. Orde Baru melalui tiga ketentuan politik berkekuatan hukum, yakni (1) UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing; (2) UU nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; dan (3) UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan bukan hanya menyalahi mandate dari UUPA. UU ciptaan Orde Baru ini secara langsung telah menandai rasionalitas baru atas sumber agraria dalam wilayah teritorial kepenguasaan baru (Husken, 1998). Penguasaan sumber agraria ini disubordinasikan sebagai pendukung akumulasi kapital yang dibungkus dengan jargon “Pembangunan” dan “Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Soeharto memosisikan diri sebagai bapak, perempuan diposisikan sebagai istri dan ibu, serta rakyat diposisikan sebagai anak. Dalam masa inilah, suara-suara perempuan tidak lebih dari sekedar istri yang melayani, merawat keluarga dan berkontribusi tanpa diberikan imbalan (Suryakusuma, 2011). Dan untuk melanggengkan peran ini, berbagai bentuk diskursus dibuat agar peran perempuan sebagai seorang istri dan ibu menjadi semakin tegas. Pidato-pidato dan kampanye yang dilakukan oleh laki-laki, ibu-ibu atau bahkan oleh negara sendiri menjadi penegasan bahwa ruang seorang ibu atau istri adalah pada ranah-ranah domestik (Abdullah, 2003).

Sebagai dampaknya, politik hukum dan kebijakan-kebijakan agraria yang menyangkut ruang hidup perempuan tidak sampai mempertimbangkan hak-hak perempuan. Program Transmigrasi dan Perkebunan Inti Rakyat (IPR) yang dilaksanakan orde baru pada 1980-an dengan dana World Bank pun tidak menganggap perempuan ada, karena sudah diwakili oleh laki-laki sebagai kepala keluarga (Austriningrum, 2019). Akibatnya, tanah-tanah yang didapat oleh transmigran hampir semuanya berada pada kepemilikan laki-laki sebagai kepala keluarga. Begitupun dengan program revolusi hijau yang secara massif dan sistemis mengubah pola bertani dan menciptakan kebergantungan petani pada pestisida berbahan kimia sintetik yang meracuni ekosistem. Revolusi hijau yang menjadi program intensifikasi pertanian ini mengubah pengerahan tenaga kerja perempuan. Indikasi akan perubahan ini adalah semakin adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam hitungan hari kerja maupun dalam hal upah (Breman dan Wiradi, 2004). Selain itu, pemilihan sistem padat modal orde baru ini menciptakan peningkatan biaya produksi yang meliputi pupuk, pestisida, dan mesin – mesin pengolahan pertanian seperti traktor, mesin penggiling gabah (*huller*) sebagai alasan untuk meningkatkan hasil produksi padi. Di lain pihak, sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, tanah, teknologi dan kredit pertanian masih dan nampaknya semakin jauh dari jangkauan petani secara adil, merata dan murah (Husken, 1998)

Tingginya marginalisasi terhadap petani perempuan ini mencapai puncaknya ketika berbagai NGO melancarkan kritik terhadap Revolusi Hijau. Sebagai jawaban, pemerintah orde baru kemudian melontarkan apa yang dikenal dengan Women in Development (WID), namun program tersebut justru melahirkan regulasi ketimbang pembebasan kaum petani perempuan. Inti dari program ini adalah untuk lebih banyak mengarahkan perempuan pada sektor-sektor informal (Breman dan Wiradi, 2004). Peralihan ini tentunya tidak mendasarkan pada persoalan inti bahwa petani perempuan mundur sebab justru digusur dari bidang produktif (LPTP, 2010).

### **Ancaman Corporate Farming dan Masa Depan Reforma Agraria**

Sejak ditandatangani kesepakatan GATT, ekonomi dunia sesungguhnya telah memihak pada kepentingan perusahaan *Transnational Corporate* (TNCs). Kesepakatan tersebut secara teoritik berhasil memaksakan keinginan mereka untuk mendesak terjadinya reformasi kebijakan nasional dalam berbagai bidang yang mendukung program-program Neo-liberalisme (Shiva, 1994). Penganut paham ekonomi Neo Liberalisme, percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai akibat kompetisi bebas. Kompetisi yang sehat tumbuh akibat kepercayaan bahwa pasar bebas itu efisien. Pendeknya, itulah cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang makin langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya telah habis atau masih banyak. Harga murah, itu berarti persediaan memadai. Namun jika produk mulai langka, harga pun naik. Jika harga tinggi, tentu orang akan menanam modal kesana. Oleh sebab itu harga

menjadi indikasi apa yang harus diproduksi. Itulah maknanya mengapa penganut Neo-Liberal tidak ingin pemerintah ikut campur, serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar (Hickel, 2018).

Campur tangan pemerintah yakni: proteksi, selain paham keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat dan berbagai tradisi adat pengelolaan sumberdaya alam berbasis rakyat dan sebagainya dianggap halangan untuk kapitalisme terus melakukan ekspansi, olehnya kapitalisme memerlukan suatu strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan “akumulasi kapital”. Strategi itu adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi, pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, dan penguatan “civil society” dan anti korupsi, yang kesemuanya dianggap sebagai penghambat pasar bebas (Chomsky, 1999).

Implikasi perubahan kebijakan nasional yang memihak kepentingan TNCs ini pada dasarnya memiliki semangat untuk menggantikan peran petani perempuan oleh TNCs sebagai penghasil pangan (Shiva, 1999). Dalam prakteknya, kebijakan ini berbentuk pengembangan agribisnis pertanian dengan cara melakukan konsolidasi lahan hamparan dari lahan-lahan kecil petani kecil sebagai “saham” yang dikelola secara profesional dalam sistem industri pemroduksi pangan. Konsep *corporate farming* tersebut akan berakibat pengusuran berbagai keanekaragaman budaya, pengetahuan, bibit serta habitat pertanian yang selama ini menjadi tempat bergantung bagi kehidupan jutaan petani. Dengan demikian, melalui kebijakan pertanian *Corporate Farming*, telah memperlicin jalan bagi perusahaan agribisnis untuk menguasai sumberdaya alam “kehidupan” petani secara mudah (Hickel, 2018). Kebijakan yang bersandar pada liberalisasi perdagangan pangan ini, bagi petani merupakan fenomena marginalisasi, terutama petani perempuan, karena peran mereka sebagai penghasil pangan akan diakhiri.

Menanggapi hal tersebut diatas, sayangnya pemerintah belum sama sekali memiliki niatan menyelesaikan persoalan agraria dan ruang hidup ini dengan menuntaskan struktur ketimpangan pada akses dan properti. Meskipun pemerintahan Joko Widodo dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan melalui nawa cita yang merupakan program 2 periodenya menyatakan pada point empat bahwa akan “Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi tuntutan kembali hak atas tanah” dan pada point lima bahwa akan “Mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah 9 juta ha” (KSP, 2019), tetapi dalam pelaksanaannya, alih-alih sesuai dengan tujuan reforma agraria untuk menjawab konflik tenurial, yakni ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah pemerintahan, Jokowi justru lebih mendorong pada tata administrasi pertanahan.

Landreform yang menjadi janji dalam masa pemerintahan Jokowi ini pun semakin jauh dari pemenuhan, jika melihat catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengenai

tingginya letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang periode 2020-2021. Dalam catatan ini disebutkan bahwa ada peningkatan jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan sektor kehutanan masing-masing yaitu 28 persen dan 100 persen dibanding 2019. Selain itu, lebih rinci konflik agraria yang terjadi sepanjang 2020 paling banyak berasal dari sektor perkebunan sebanyak 122 kasus. Selanjutnya, berturut-turut sektor kehutanan (41 kasus), infrastruktur (30), properti (20), pertambangan (12), fasilitas militer (11), pesisir kelautan (3), dan agribisnis (2). Sementara, ditinjau dari luas lahan, ada 624.272,711 hektar lahan yang masuk dalam konflik agraria. Sedangkan, jumlah korban terdampak konflik agraria sebanyak 135.332 kepala keluarga (KPA, 2020).

### **Agenda Gerakan Perempuan Petani**

Saat ini berbagai gerakan resistensi terhadap penyempitan ruang hidup, perubahan struktur agraria semakin timpang. Dalam beberapa kasus gerakan-gerakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai “New Social Movement” ini menjadikan petani, utamanya petani perempuan sebagai basis massa utama. Dalam hal ini gerakan sosial yang menentang watak otoriterian kekuasaan negara dan sikap ekstraktif dari proses ekonomi yang dominan melalui New Social “peasant” Movement terus tumbuh baik dalam skala lokal, nasional, bahkan global. Misalnya, Gerakan Pembaharuan Agraria yang dikembangkan oleh Serikat Petani Sumatra Utara dan Konsorsium Pembaharuan Agraria, serta Gerakan Petani Ramah Lingkungan dan petani PHT serta melalui gerakan Transnational Institute. Bahkan dalam beberapa kejadian seperti di Chipko, atau bahkan di Kendeng, pengarusutamaan gender sebagai gerakan resistensi petani perempuan memiliki makna strategis bukan hanya sebatas strategi gerakan, tetapi karena mereka diperlukan untuk memberi prospektif menyangkut hak “perempuan” terhadap akumulasi dan sumber-sumber agraria. Gerakan-gerakan semacam ini penting untuk menciptakan keadilan bagi petani perempuan.

Menyangkut hal tersebut di ataslah, gerakan petani dengan mempertimbangkan relasi gender menjadi penting. Tanpa mempertimbangkan implikasi gender, suatu perjuangan dan gerakan petani dalam memperjuangkan hak hak petani, maupun dalam memperjuangkan reformasi agraria, justru hanya akan melanggengkan ketidakadilan bagi petani perempuan. Bahkan penderitaan yang dialami oleh petani perempuan akibat diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang ditimbulkan akibat dari relasi gender dikalangan petani sama seriusnya dengan yang dirasakan oleh petani perempuan ketika mereka merasakan akibat ketidakadilan dalam perampasan ruang hidup.

Banyak kasus menunjukkan, bahwa Organisasi Tani Perempuan tingkat lokal mempunyai peran penting dalam berbagai aksi pengambilan kembali tanah mereka dari perkebunan. Akan tetapi ketika tanah itu harus didistribusikan kembali kepada para petani, betapa kecewanya para

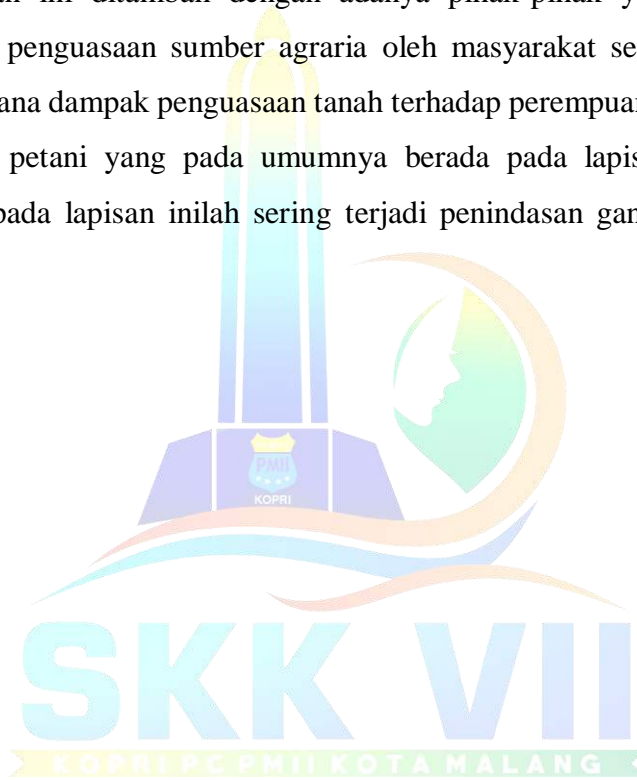


petani perempuan karena struktur rumah tangga dan relasi gender para petani yang tidak demokratis dan tradisi masyarakat petani yang tidak memberikan hak bagi kaum perempuan atas tanah, telah mengakibatkan marginalisasi petani perempuan lantaran mereka tidak mempunyai akses dan kontrol atas tanah. Oleh karena itu, tanpa membongkar terlebih dahulu sistem patriarki yang ada di masyarakat petani dan tanpa menata kembali relasi gender di rumah tangga para petani masing-masing, setiap gerakan aksi untuk reformasi agraria akan dilumpuhkan oleh ketidakadilan gender yang secara sistematis dan kokoh berada di masyarakat petani. Berangkat dari hal tersebut, sebenarnya agenda yang harus dilakukan lebih dahulu oleh gerakan petani adalah melakukan proses demokratisasi terhadap relasi gender di rumah tangga masing-masing sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gerakan untuk memberdayakan dan mencapai hak-hak petani perempuan.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi pada dasarnya peran ganda perempuan bukanlah suatu hal baru, khususnya perempuan yang hidup di daerah pedesaan yang miskin. Bagi perempuan yang hidup dalam keluarga miskin, peran ganda ini memang telah ditanamkan sejak dini, yang membuat perempuan harus terlibat dalam kewajiban kerja untuk menambah pendapatan keluarga. Peran ganda tersebut dalam banyak hal ternyata juga dipengaruhi oleh norma-norma yang dianut dan dipraktikkan pada akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Norma-norma tersebut pada dasarnya adalah pola diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk karena perbedaan jenis kelamin (ada laki-laki dan perempuan). Perempuan, selama ini masih sering ditempatkan pada posisi domestik. Sebuah peran stereotip dalam aspek kehidupan, dan dalam tradisi ini berbagai tempat masih belum dapat melepaskan diri dari pemahaman yang merugikan perempuan tersebut. Keterbelakangan, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, lemahnya akses informasi, adalah masalah yang senantiasa dihadapi oleh perempuan-perempuan di seluruh pelosok Indonesia dan aktivitas keseharian mereka sebenarnya hampir tidak ada perbedaan dengan apa yang dilakukan laki-laki dalam hal aktivitas mencari nafkah dan aktivitas lain yang dapat dikategorikan aktivitas publik.

Uraian di atas, dalam konteks pertanian, nampaknya cukup jelas menyatakan bahwa telah terjadinya pemiskinan perempuan petani yang bertumpu pada tergesernya perempuan petani dari pekerjaan mereka sebagai petani sehingga menyebabkan mereka terpaksa keluar untuk mencari pekerjaan lain untuk menopang kehidupan keluarganya. Pilihan-pilihan mata pencaharian oleh perempuan petani yang terpaksa keluar dari pertanian itupun pada umumnya adalah mata pencaharian yang marginal seperti: buruh pabrik yang dibayar harian jika pabrik tersebut memproduksi atau pembantu rumah tangga sambil tetap melakukan aktivitas mengais sisa panen di lahan sawah, atau tenaga kerja keluar negeri yang dalam banyak hal juga tidak dapat mengubah kehidupan sosial mereka yang memang telah terpinggirkan. Realitas lain yang

masih harus dihadapi oleh perempuan dalam kontes pertanian adalah persoalan ketimpangan dalam hal akses dan kontrol atas pengaturan sumber agraria. Adanya konsep kodrat yang secara sosial dan budaya mengharuskan perempuan berkerja lebih keras untuk membantu menopang kehidupan rumah tangga atau keluarganya, menyebabkan perempuan harus menerima keadaan sebagai warga negara kelas dua dalam masyarakat. Ketimpangan dalam hal akses dan kontrol atas pengaturan sumber agraria secara sederhana dapat dilihat dari adanya keadaan yang menempatkan perempuan seolah tidak mempunyai hak pemilikan dan penguasaan yang sama dengan laki-laki. Kemudian ketimpangan dalam hal akses dan kontrol dalam hal pengaturan sumber agraria yang nyata terlihat di daerah-daerah yang berkonflik dengan tersingkirnya petani dan juga perempuan petani di dalamnya, bagi perempuan kondisi ketimpangan tetap saja ada bahkan setelah konflik selesai. Karena pengaturan sumber agraria sering tidak melibatkan perempuan. Keadaan ini ditambah dengan adanya pihak-pihak yang hanya memikirkan bagaimana dampak penguasaan sumber agraria oleh masyarakat setelah konflik, dan tidak memikirkan bagaimana dampak penguasaan tanah terhadap perempuan. Artinya dalam banyak hal isu perempuan petani yang pada umumnya berada pada lapisan bawah sering tidak tersentuh, padahal pada lapisan inilah sering terjadi penindasan ganda terhadap perempuan petani.



**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



**B. NAMA KEGIATAN**

Kegiatan ini diberi nama “**SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) KE-VII**”

**C. TEMA KEGIATAN**

Kegiatan ini bertemakan “*Aktualisasi Gerakan Perempuan dalam Impresi Kebijakan Reforma Agraria*”

**D. LANDASAN KEGIATAN**

- a. Berasaskan Pancasila
- b. AD/ART PMII
- c. MUSPIMNAS dan MUSPINCAB
- d. Berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah
- e. Program Kerja Pengurus KOPRI Cabang PMII Kota Malang
- f. Rapat Pengurus Cabang PMII Kota Malang

**E. TUJUAN KEGIATAN**

- a. Mampu memahami konsep keadilan gender
- b. Mampu memahami konteks masalah perempuan dan agraria dalam relasi sosial pedesaan.
- c. Mampu menguatkan tindakan afirmatif gerakan petani perempuan dalam konteks perjuangan Reforma Agraria
- d. Mampu memiliki jiwa kepemimpinan serta bermanfaat bagi masyarakat

**F. TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN**

Hari/Tanggal : Senin – Jum'at, 08 – 12 November 2021

Waktu : 08.00 – selesai

Tempat : Dinas Sosial Kota Malang

**G. PESERTA**

Peserta pelatihan ini adalah delegasi dari pengurus komisariat Kota Malang dan seluruh pengurus cabang Jawa Timur, dengan ketentuan: **MALANG**

- a. Delegasi dari Pengurus Komisariat se-Kota Malang minimal 2 kader KOPRI maksimal 5 kader dari setiap komisariat.
- b. Delegasi dari Pengurus Cabang se-Jawa Timur maksimal 2 kader KOPRI setiap cabang.

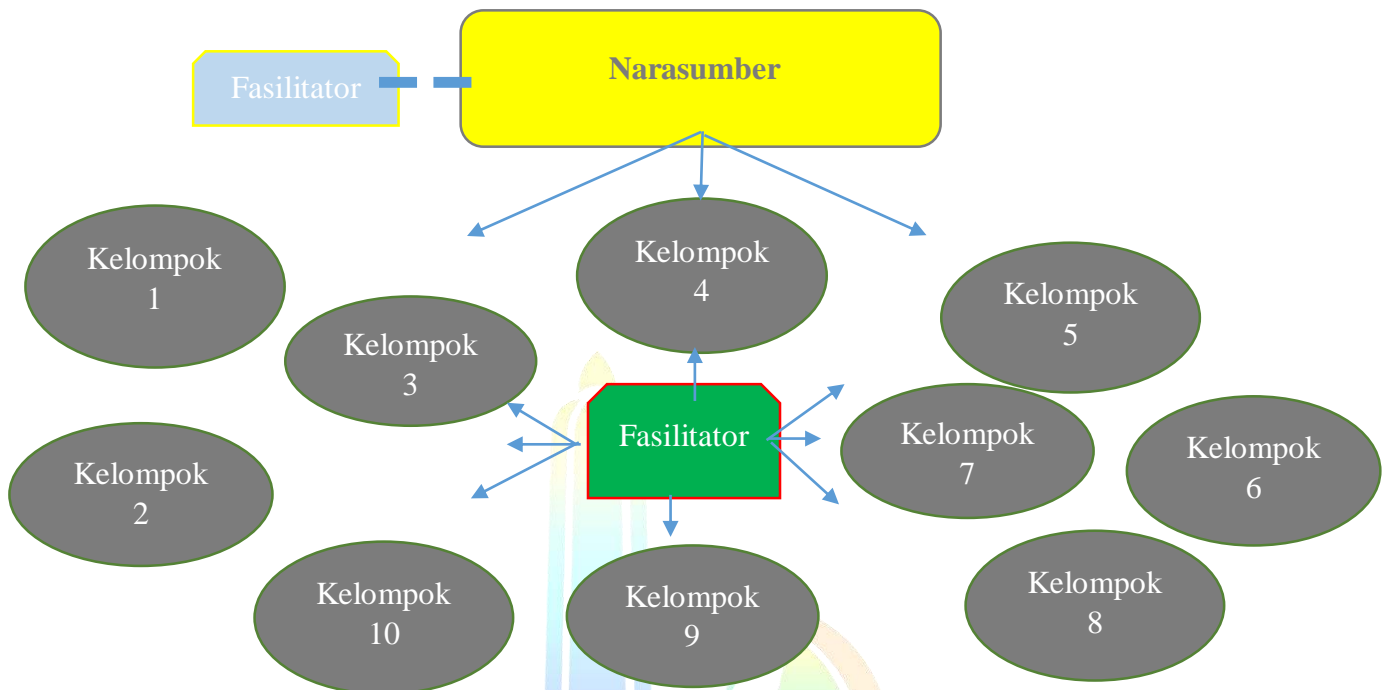
**H. PERANGKAT PELAKSANA KEGIATAN**

Kegiatan Sekolah Kader Kopri melibatkan beberapa unsur, yaitu :

1. Pelindung
2. Penanggung jawab
3. Screening Committee
4. Organizer Committee

5. Moderator
6. Narasumber
7. Instruktur
8. Fasilitator

#### I. DESAIN FORUM SKK



#### TUJUAN:

Peserta dapat lebih mudah dalam menerima seluruh materi secara utuh dengan desain forum panel narasumber-fasilitator.

#### Catatan:

Pembagian kelompok dilakukan dengan memperhitungkan jumlah peserta SKK secara keseluruhan.

#### J. METODE PELATIHAN

- a. Instruksi dan semi partisipatoris
- b. Seminar
- c. Ceramah dan dialog
- d. Pleno diskusi kelompok
- e. Diskusi panel
- f. Screening
- g. Fieldtrip
- h. Forum Group Discussion
- i. Rencana Tindak Lanjut

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772  
Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



<b>Nama</b>	<b>Metode</b>	<b>Bahan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Waktu</b>
<b>Narasumber</b>	- Presentasi/ceramah - Praktik	Spidol Kertas manila Papan tulis PPT	Forum dapat berjalan secara panel dan efektif	<b>60 menit</b>
<b>Fasilitator</b>	- Presentasi - Study kasus - Brainstorming - FGD	Kertas Spidol Media diskusi	Forum dapat berjalan secara panel dan efektif	<b>45 menit</b>
<b>Proses Kegiatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (5 menit) pengantar materi sebagai pra-wacana oleh fasilitator</li> <li>2. (35 menit) presentasi materi oleh pemantik atau narasumber</li> <li>3. (35 menit) breakout (diskusi kelompok peserta) didampingi fasilitator</li> <li>4. (45 menit) presentasi setiap kelompok</li> <li>5. (25 menit) pendalaman materi oleh narasumber</li> <li>6. (20 menit) pendalaman materi oleh peserta QnA</li> <li>7. (10 menit) kesimpulan akhir dari narasumber</li> <li>8. (10 menit) post-test oleh fasilitator</li> </ol>			

**CATATAN**

Dengan perhitungan analisis waktu pada setiap pembagian sesi pengantar materi terbagi 185 menit dalam satu serangkaian forum dimana tugas fasilitator-narasumber memastikan proses pemahaman peserta menggunakan instrumen penilaian berbasis potensi dasar.

**K. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Secara teknis kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia sekolah kader kopri (SKK-VII) oleh KOPRI PC PMII Kota Malang.

**L. RANGKAIAN KEGIATAN**

Adapun rangkaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran I : 18 -24 Oktober 2021
2. Pendaftaran II : 25-30 Oktober 2021
3. Pengumuman lolos berkas : 01 November 2021
4. Pendalaman materi : 02 November 2021
5. Screening : 03 -05 November 2021
6. Pengumuman kelolosan peserta : 06 November 2021 :
7. Technical Meeting : 07 November 2021
8. Pelaksanaan kegiatan : 08 - 12 November 2021

**M. MATERI KEGIATAN**

Kegiatan Sekolah Kader KOPRI ke-VII terdiri dari beberapa materi yaitu:

1. Gerakan Perempuan di Indonesia
2. Sinergi dan Relasi KOPRI dengan Gerakan Multisektor (Grassroot)
3. Stigmatisasi Budaya

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



4. Analisis Sosial Gender
5. Advokasi Kebijakan Publik berbasis Gender
6. Teknik Lobbying dan Penguatan Jaringan
7. Penguasaan Media
8. Analisis Struktur Patriarki
9. Teknik Pengorganisasian
10. Sejarah Gerakan Reforma Agraria
11. Fieldtrip dan RTL

**N. NARASUMBER KEGIATAN**

Setiap materi pada kegiatan sekolah kader KOPRI ke-VII disampaikan oleh beberapa narasumber yaitu:

1. M. Nuruddin
2. Hikmah Bafaqih
3. Nadia Bafagih
4. Dini Adhiyati
5. Hanny Wijaya
6. Samsul Maarif
7. Heryanto
8. Rina Arinta
9. Ubet Anom
10. Ummi Khorotinnasihah

**O. FASILITATOR KEGIATAN**

1. Uswatun Hasanah Makluf
2. Habibah Rahmatu Pidi
3. Izzudin
4. Wiji Wulansari
5. Bagus Setio Nugroho
6. Novita C.L.
7. R.A. Novita Zaini
8. Saiful Anam
9. Santi
10. Putri Yuliana

**P. PERSYARATAN PESERTA**

*Terlampir 1*

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



**Q. RUNDOWN ACARA**

*Terlampir 2*

**R. SUSUNAN KEPANITIAAN**

*Terlampir 3*

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Malang, 30 September 2021

PANITIA PELAKSANA  
SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
PC PMII KOTA MALANG PERIODE 2021-2022

  
**Inas Aqila Sabrinata**  
*Ketua Pelaksana*

  
**Nur Jazah Anil Khusna**  
*Sekretaris*



  
**Aisyatir Rodliyah Bahtiar**  
*Ketua KOPRI*



**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



Lampiran 1

**PERSYARATAN PESERTA  
SEKOLAH KADER KOPRI (SKK) KE-VII**

1. Setiap cabang maksimal mendelegasikan 2 kader putri (eksternal Kota Malang)
2. Peserta adalah pengurus komisariat dan atau kader dalam masa transisi kepengurusan pasca rayon
3. a. Telah mengikuti SIG (Sekolah Islam Gender), SKP (Sekolah Kader Putri) dan PKD (Pelatihan Kader Dasar), yang ditunjukkan dengan foto copy sertifikat/surat pernyataan dari rayon/komisariat yang melaksanakan (internal Kota Malang)  
b. Telah mengikuti SIG dan PKD ditunjukkan dengan foto copy sertifikat/surat pernyataan dari rayon/komisariat yang melaksanakan (eksternal Kota Malang)
4. Melampirkan pas foto 3×4 sebanyak 2 lembar background merah
5. a. Mendapatkan surat rekomendasi dari komisariat setempat (internal Kota Malang)  
b. Mendapatkan surat rekomendasi dari cabang setempat (eksternal Kota Malang)
6. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia
7. Mengisi surat pernyataan kesanggupan mengikuti keseluruhan rangkaian acara (bermaterai 10.000)
8. a. Membuat abstrak dengan Tema **“Aktualisasi Gerakan Perempuan dalam Impresi Kebijakan Reforma Agraria”**  
b. Mengirimkan karya tulis ilmiah yang bertema **“Perempuan dan Agraria”**  
**Dengan format ketentuan:**
  - a. Menggunakan kertas A4
  - b. Menggunakan font Times New Roman, size: 12, spasi: 1,5, Margins Top: 4, Bottom: 3, Left: 4, Right: 3.
  - c. Terdiri dari 500 kata
  - d. Format penulisan berisi Analisis Umum, Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar Rujukan.
  - e. Tulisan berupa Karya Tulis Ilmiah dengan memilih sub tema:
    - Partisipasi Perempuan dalam Bidang Agraria
    - Reforma Agraria
    - Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pertanian Berkeadilan
    - Perempuan Tani dan Konflik Agraria
9. Melunasi biaya registrasi sebesar Rp 200.000,- (internal), Rp 250.000 (eksternal). Pembayaran via transfer **Bank Jatim - No. Rek. 2032103688 an. PC PMII KOTA MALANG** (Melampirkan bukti pembayaran)
10. Peserta yang lolos berkas wajib mengikuti screening pada tanggal 03 - 05 November 2021 dan bagi yang tidak mengikuti screening maka tidak dapat mengikuti SKK
11. Persyaratan dapat dikirim melalui via email; [kopripcpmiikota@gmail.com](mailto:kopripcpmiikota@gmail.com) dengan mencantumkan subjek “Pendaftaran SKK” dan untuk hard file dibawa pada saat screening.
12. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi No. 081330499048 (Inas-Ketua Pelaksana), 081357168772 (Nurul-Koordinator SC), 085156523659 (Diah-Ketua KOPRI)



**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



**FORMULIR PENDAFTARAN  
SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII**

Nama :  
TTL :  
Alamat sesuai KTP :  
Alamat domisili :  
Jurusan/Fakultas/Univ :  
Asal Rayon/Komisariat :  
Tgl & Tahun SIG :  
Tgl & Tahun SKP : (Khusus Internal Malang)  
Tgl & Tahun PKD :  
Riwayat Pendidikan :

Nama Lembaga	Jurusan	Tahun Masuk- Keluar

Pengalaman Organisasi :

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Periode

No. Hp/E-Mail :

Bidang yang Ditekuni :

Motivasi Ikut SKK :

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772  
Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Asal Komisariat/Cabang :

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa:

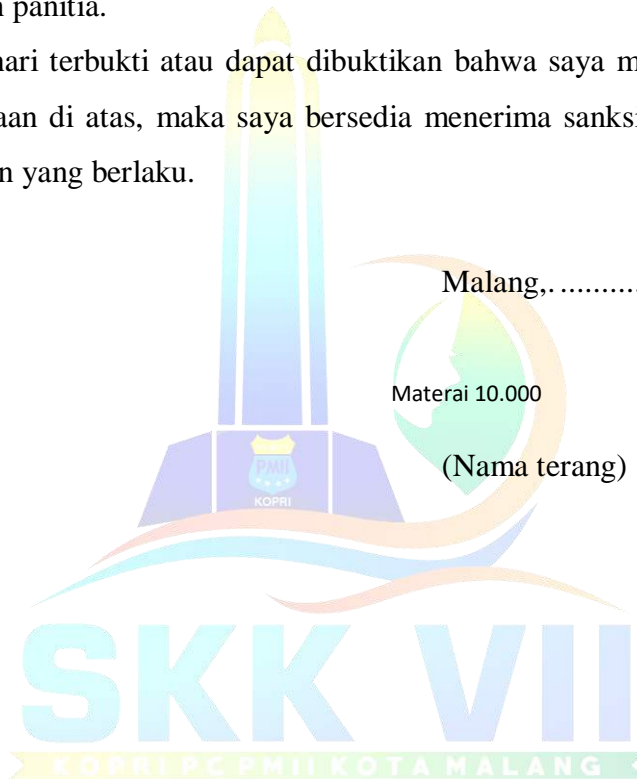
1. Semua data yang diberikan kepada Panitia Sekolah Kader KOPRI ke VII, KOPRI PC PMII Kota Malang benar adanya. Tidak ada unsur manipulasi kelengkapan administrasi, dan plagiasi tulisan baik esai maupun paper.
2. Sanggup mengikuti Sekolah Kader KOPRI ke VII dari awal hingga akhir sesuai jadwal yang ditentukan panitia
3. Siap mengikuti serangkaian agenda Sekolah Kader KOPRI ke-VII sesuai dengan peraturan yang ditentukan panitia.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa saya melanggar salah satu atau keseluruhan 3 pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, .....2021

Materai 10.000

(Nama terang)



**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772  
Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



Lampiran 2. Susunan acara

**SUSUNAN ACARA  
SEKOLAH KADER KOPRI**

<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>ACARA</b>	<b>PENGISI ACARA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Senin, 08 November 2021	07.00- 08.30	Registrasi peserta SKK	Sie. Kesekretariatan	Kesekretariatan dan Sekretaris
	08.31- 09.00	Pengkondisian peserta untuk seminar dan pembukaan	Peserta dan Pengurus Cabang	Sie. Acara
	09.01- 12.00	Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembacaan ayat suci Al-Qur'an</li><li>• Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PMII.</li><li>• Sambutan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketua pelaksana</li><li>- Ketua KOPRI</li><li>- Ketua KOPRI Cabang</li></ul></li><li>• Doa</li></ul>	- Mc - Qori' - Dirijen - Doa	Sie. Acara
	12.01- 15.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie. Keamanan
	15.01- 17.15	Stadium General	Steering Committee (SC)	Sie. Acara
	17.16- 19.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie Keamanan
	19.01- 22.00	Materi I <b>Gerakan Perempuan di Indonesia</b>	Pemateri : Umi Khorirotin Nasichah  Fasilitator : Uswatun K.	Sie. Acara
	22.05- 04.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie Keamanan

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII**  
**KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI**  
**KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcmiikotamalang@gmail.com)



Selasa, 09 November 2021	04.00- 05.00	Shalat Subuh Berjama'ah	Panitia dan Peserta	Sie Keamanan
	05.00- 08.00	Senam dan Makan Pagi	Panitia dan Peserta	Sie.Konsumsi
	08.01- 11.00	Materi II <b>Sinergi dan Relasi KOPRI dengan Gerakan Perempuan Multisektor (Grassroot)</b>	Pemateri : Dini Adhiyati  Fasilitator : Wiji Wulansari	Sie Acara
	11.00- 13.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie.Konsumsi
	13.01- 16.00	Materi III <b>Stigmatisasi Budaya'</b>	Pemateri : Rina Arinta  Fasilitator : Habibah R.	Sie.Acara
	16.01- 19.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie Konsumsi
	19.01- 22.00	Materi IV <b>Analisis Sosial Gender</b>	Pemateri : M. Nuruddin  Fasilitator : Saiful Anam	Sie. Acara
	22.00- 04.00	Berlayar ke pulau kapuk	Panitia dan Peserta	Sie. Keamanan
Rabu, 10 November 2021	04.00- 04.30	Shalat Subuh Berjama'ah	Panitia dan Peserta	Sie Keamanan
	04.31- 08.00	Senam dan Makan Pagi	Panitia dan Peserta	Sie Konsumsi
	08.00- 11.00	Materi V <b>Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender</b>	Pemateri : Samsul Maarif  Fasilitator : Novita Zaini	Sie Acara
	11.01- 13.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie Konsumsi
	13.01- 16.00	Materi VI <b>Teknik Lobbying dan Penguatan Jaringan</b>	Pemateri : Hikmah Bafaqih  Fasilitator : Bagus S.	Sie Acara
	16.01- 19.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie Acara

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



	19.00-22.00	Materi VII <b>Penguasaan Media</b>	Pemateri : Heryanto  Fasilitator : Novita CL	Sie.Acara
	22.00-04.00	Berlayar Di Pulau Kapuk	Panitia dan Peserta	Sie Keamanan
Kamis, 11 November 2021	04.00-05.00	Shalat Subuh Berjama'ah	Panitia dan Peserta	Sie Keamanan
	05.00-08.00	Senam dan Makan Pagi	Panitia dan Peserta	Sie Konsumsi
	08.00-11.00	Materi VIII <b>Analisis Struktur Patriarki</b>	Pemateri : Hani Wijaya  Fasilitator : Santi	Sie Acara
	11.00-13.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie Konsumsi
	13.00-16.00	Materi IX <b>Teknik Pengorganisiran</b>	Pemateri : Ubed Anom  Fasilitator : Futri	Sie Acara
	16.00-19.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie Konsumsi
	19.01-22.00	Materi X <b>Sejarah Gerakan Reforma Agraria</b>	Pemateri : Nadia Bafagih  Fasilitator : Izuddin	Sie Acara
	22.00-04.00	ISHOMA	Panitia dan Peserta	Sie Konsumsi
Jum`at, 12 November 2021	04.00-04.30	Shalat Subuh Berjama'ah	Panitia dan Peserta	Sie Keamanan
	04.31-08.00	Senam dan Makan Pagi	Panitia dan Peserta	Sie Konsumsi
	08.01-09.00	<b>Pengkondisian persiapan berangkat field trip</b>	Panitia dan Peserta	SC
	09.01-09.45	Perjalanan menuju tempat field trip	Panitia dan Peserta	Sie. Acara
	09.46-13.00	Rangkaian field trip	Panitia dan Peserta	SC

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII**  
**KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI**  
**KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



	13.01-13.45	Perjalanan kembali menuju lokasi SKK	Panitia dan Peserta	Sie Acara
	13.46-14.15	Pengkondisian menuju forum	Panitia dan Peserta	Sie Keamanan
	14.15-15.45	<b>RTL</b>	SC dan Peserta	Sie Acara
	15.46-16.15	Persiapan penutupan	Panitia dan Peserta	Sie Acara
	16.16-16.46	Penutupan acara skk	Panitia dan Peserta	Sie. Acara



**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772

Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



*Lampiran 3. Kepanitiaan*

Lampiran : Surat Keputusan PC KOPRI PMII Kota Malang  
Nomor : 043.KOPRI-PC-XLV.V-04.02.01-043.D-I.09.2021

**SUSUNAN KEPANITIAAN  
SEKOLAH KADER KOPRI VII KOPRI KOTA MALANG**

<b>Pelindung</b>	<b>: Megiyanto, S.Pdi.,M.Pdi</b>
<b>Penanggung Jawab</b>	<b>: Moh. Sai Yusuf Aisyatir Rodliyah Bahtiar</b>
<b>Steering Commite</b>	<b>: Nurul Afiyatul Jannah Siska Nihayatul Khusna Badrus Sholeh Faith Liberta Aida Muhammad</b>
<b>Ketua Pelaksana</b>	<b>: Inas Aqila Sabrinata</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Nur Jazah Anil Khusna</b>
<b>Bendahara</b>	<b>: Luluk Anggraini</b>
<b>Sie.Acara</b>	<b>: Aini Mukrimah (CO) Abel Farochi Aristo Dema S. Miri Pariyastuti Moh. Yazid Fauzi Mas Ahmad DM</b>
<b>Sie. Kesekretariatan</b>	<b>: Aida M. Noor (CO) Moh. Faisol M. Saiful Rohman Adib Maulida Nur Rizqiya Fimauidina Ahmad Mukmin</b>
<b>Sie.Perlengkapan</b>	<b>: Adnan Maghribbi SS (CO) Jefry Hadi Mambaul Hikam Eliza Isnaini Syahputri Farchan Anas Achmad Fauzi Kasim Didit Prasetyo Mahdub</b>
<b>Sie.Konsumsi</b>	<b>: Meilina Martasari (CO) Hafifatun Nisa' Ajeng Wafaul Jumroh Gustamin Abjar Murja'ie Hibria Olivia Indayu Sri Mulyani</b>

**SEKOLAH KADER KOPRI KE-VII  
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI  
KOPRI PC KOTA MALANG**

Kantor : Jl. Mayjend Pandjaitan no. 164 Malang 65113 telp. 081357168772  
Email : [Kopripcpmiikotamalang@gmail.com](mailto:Kopripcpmiikotamalang@gmail.com)



**Sie. Pubdekdok**

**: Febry Adi Susmianto (CO)**

Andi Ansarullah Ibrahim  
Andy Prastyo  
Abu Rizal  
M. Syarifuddin  
Eka Arianto  
M. Amin Iqbal Alam

**Sie. Humas**

**: Ahmad Saifulloh (CO)**

Lutfilah  
M. Arif Dermawan  
Yoda Mahfuddin Halim  
Novia Anjaswari  
Anjas Pramono  
M R Firdausi

**Sie. Kesehatan dan  
Keamanan**

**: Khairunnisa Fauziah M. (CO)**

Ihwan Ansori A  
Yulifita Ayuningtyas  
Ainun Aulia Rahman  
Mashuril Ilmi

